



STRATEGI PERTAHANAN PERAIRAN PEDALAMAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NON-MILITER DI SUNGAI MAHAKAM

*Strategy of Internal Water Defense In Confront of Non-Military Threat
In The Mahakam River*

**Rizky Thesalonika Yulyanti R1, Amanda Mary Kartika Palar,
Mayang Agnezia Parasasti**

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI
(rizkythesalonika@gmail.com, amandamkpalar@gmail.com,
mayangagnez11@gmail.com)

Abstraksi

Kepentingan perlindungan warga negara, wilayah, dan sistem politik dari ancaman negara lain adalah bagian dari pertahanan negara yang merupakan elemen pokok sebuah negara. Jika melihat pada situasinya, ancaman yang terjadi di Sungai Mahakam tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman militer, tetapi lebih mengarah kepada ancaman non-militer. Berbagai faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan, serta keselamatan segenap bangsa dapat dipahami sebagai ancaman non-militer. Jika tidak ditangani dengan serius, maka ancaman non-militer di Sungai Mahakam ini dapat berkembang menjadi kondisi permanen yang dapat bertransformasi menjadi ancaman besar terhadap pertahanan negara. Sebagai upaya memformulasikan strategi pertahanan perairan pedalaman di Indonesia, penelitian ini mengelaborasi 4 teori yaitu: Teori strategi maritim, Teori kekuatan laut, Teori ancaman, dan Konsep riverine operation untuk menghindari ancaman di Sungai Mahakam. Dalam penyusunan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Angkatan Laut diharapkan dapat menerapkan pertahanan di perairan pedalaman di kawasan Sungai Mahakam untuk menghindari ancaman non militer dan mendukung terciptanya pertahanan negara di IKN Nusantara.

Kata Kunci: Ancaman Non-Militer, Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman, Sungai Mahakam, IKN Nusantara, Indonesia



Abstract

The importance of protecting citizens, territories, and political systems from threats from other countries is part of national defense which is the main element of a country. If you look at the situation, the threats that occur in the Mahakam River cannot be categorized as military threats, but rather lead to non-military threats. Various non-military factors that are considered to have capabilities that endanger the territorial integrity of the country, sovereignty, and the safety of the entire nation can be understood as non-military threats. If not taken seriously, this non-military threat in the Mahakam River can develop into a permanent condition that can transform into a major threat to national defense. In an effort to formulate a defense strategy for inland waters in Indonesia, this study elaborates 4 theories, namely: maritime strategy theory, sea power theory, threat theory, and riverine operation concept to avoid threats on the Mahakam River. In the preparation of this study used qualitative research methods. The results of this study conclude that the Navy is expected to be able to implement defense in inland waters in the Mahakam River area to avoid non-military threats and support the creation of national defense in IKN Nusantara.

Keywords: Non-Military Threats, Internal Water Defense Strategy, Mahakam River, IKN Nusantara, Indonesia

Pendahuluan

Pencanangan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipindahkan ke Penajam Paser Utara akan dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2045 yang lebih global dan berkeadilan, dengan mempercepat pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur. Pemindahan ibu kota provinsi dari Jawa ke Kalimantan mendorong pemerataan daerah untuk mempersempit kesenjangan antara wilayah Indonesia bagian Timur dan wilayah Indonesia bagian Barat, khususnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini berdasarkan kepada pertimbangan mengenai keunggulan wilayah tersebut. Keunggulan yang ada antara lain: 1. Lokasi Kalimantan Timur yang dianggap strategis yang berada tepat di wilayah tengah Indonesia serta dilintasi oleh ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia II; 2. Infrastruktur yang dimiliki relatif lengkap; 3. Letak wilayah IKN berdekatan dengan



Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang merupakan kota pendukung serta sudah berkembang; 4. Ketersediaan wilayah yang dikuasai pemerintah yang dapat membantu pengembangan IKN; 5. Bencana alam di wilayah tersebut tidak berisiko besar (Bappenas, 2022).

Penelitian ini akan mengkaji mengenai strategi pertahanan perairan pedalaman dalam menghadapi ancaman non-militer di Sungai Mahakam. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman terkait dengan hasil yang bersifat prediktif mengenai apa saja ancaman non-militer yang terjadi dan yang kemungkinan terjadi di sepanjang Sungai Mahakam, penerapan strategi pertahanan perairan pedalaman dalam mendukung pertahanan negara di Ibu Kota Nusantara.

Kondisi dinamika yang ada di lingkungan strategis yang dinamis mempengaruhi dalam pengelolaan atau pengaturan pertahanan saat ini. Salah satu kondisi lingkungan strategis yang harus diperhatikan dalam beberapa tahun ke depan adalah bertumbuhnya perekonomian yang mempengaruhi peningkatan kekuatan militer, terutama pada kota – kota dan negara – negara tetangga yang berbatasan secara langsung dengan IKN baru. Dinamika ini memiliki pengaruh kuat pada bentuk dari ancaman saat ini yang sangat rumit, canggih, dan multidimensi dalam bentuk ancaman militer, ancaman non-militer, serta ancaman hibrida yang dapat diklasifikasikan menjadi ancaman secara nyata dan tidak nyata.

Berbagai bentuk yang dapat mengancam antara lain radikalisme dan terorisme, pemberontakan bersenjata dan separatisme, bencana alam, batas wilayah yang dilanggar, pembajakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Situasi politik dalam negeri bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dari seluruh perkembangan yang ada menjadi tantangan yang akan berdampak pada berlangsungnya pertahanan negara di Indonesia khususnya di IKN Nusantara (Kementerian Pertahanan RI, 2015).



Pertahanan negara yang saat ini diselenggarakan bertujuan untuk melindungi dan menjaga kekuasaan negara, kesatuan wilayah, dan keamanan bangsa. Pertahanan bangsa Indonesia terdiri dari sistem pertahanan universal yang tidak agresif dan minimnya perkembangan untuk melindungi kepentingan dan tujuan nasional. Penyelesaian masalah terkait pertahanan dan dampaknya dapat dijalankan dengan mengutamakan peran diplomasi kuat dalam hal ini melalui alutsista yang modern.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan disajikan melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian secara kualitatif meliputi penguraian data serta penyajian data dalam bentuk penjelasan (sebagai contoh: tulisan, rekaman suara, dan video) yang berguna dalam memahami opini, konsep, dan pengalaman. Berbagai hal tersebut digunakan untuk menggabungkan pemahaman yang mendalam terkait suatu permasalahan atau menghasilkan ide – ide baru dalam pengembangan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan metode berupa pengumpulan data. Penelitian primer digunakan peneliti pada penelitian ini didapatkan melalui paparan narasumber secara online dan sekunder dengan menyatukan seluruh keterangan informasi berupa tulisan, ilustrasi, file audio atau video, dll.

Peneliti memilih teori strategi pertahanan laut sebagai teori utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, teori ancaman dalam penelitian ini berfokus kepada ancaman non-militer, teori Sea Power, serta konsep mengenai Riverine Operation. Teori yang ada diharapkan mampu untuk membantu dalam memberikan analisis mendalam serta melihat strategi pertahanan perairan pedalaman dalam menghadapi ancaman non-militer di Sungai Mahakam yang akan diaplikasikan oleh Indonesia terutama di Samarinda, Kalimantan Barat dalam mendukung pertahanan negara di Ibu Kota baru.



Hasil dan Pembahasan

Pertahanan Maritim

Strategi pertahanan maritim merupakan hal krusial terkait dengan pengaturan kekuatan militer suatu negara dalam rangka menyiapkan sarana prasarana guna mengaplikasikan kekuatannya pada daerah yang diinginkan di sepanjang wilayah pesisir dan perairan pedalaman. Wilayah litoral sendiri merupakan daerah yang berada di sepanjang garis pantai atau pesisir. Dalam operasi pertahanan yang dilakukan bersama maka membutuhkan hal-hal yang memiliki efektifitas tinggi pada wilayah disepanjang garis pantai atau pesisir (Sea Power Centre Australia, 2013).

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategis sekarang ini strategi maritim atau strategi pertahanan maritim tidak hanya mengacu pada kekuatan dan strategi dari TNI Angkatan Laut. Pada masa sekarang strategi maritim tidak hanya menggunakan kekuatan laut saja akan tetapi menggabungkan tiga kekuatan yaitu darat, laut serta udara. Ketiga kekuatan ini beroperasi secara bersama-sama dalam rangka menjaga pesisir dan perairan pedalaman dalam hal ini sangat. Kontrol laut dilakukan dengan dukungan dari kekuatan darat dan kekuatan udara. Di dalam Parliament of Australia (2018) strategi maritim didasarkan kepada tiga substansi krusial yaitu power projection, sea denial, dan yang terakhir adalah sea control.

Menghadapi dinamika yang ada di lingkungan strategi maka Angkatan Laut melaksanakan operasi gabungan bersama dengan pasukan dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Dengan adanya operasi gabungan dari ketiga kekuatan ini maka strategi militer nasional dapat dilaksanakan lebih maksimal. Pada masa modern, Angkatan Laut memberikan berbagai kebijakan yang mencerminkan hal



tersebut dengan langsung mencoba memberikan penentu dan kelanjutan yang berpengaruh dalam mencapai kepentingan bersama.

Sea Power

Mahan (1890) mengemukakan Sea Power Theory dengan dua aspek penting dari Naval Power Theory Mahan yaitu geopolitik yang berkaitan dengan strategi angkatan laut dan komando angkatan laut. Mahan berpendapat bahwa hubungan antara persaingan komersial kolonial dan maksud untuk memperluas kekuasaan kolonial membentuk konflik bersenjata tidak dapat dibendung. Terbukanya perdagangan dunia melalui laut yaitu pelayaran ke seluruh dunia memberikan kemakmuran bagi penjajah, dan perdagangan pelayaran laut tersebut akan berjalan dengan baik jika memiliki armada dan kekuatan laut yang memadai sehingga mampu untuk melindungi jalur perdagangan suatu negara.

Pedoman penting bagi suatu bangsa negara dalam menguasai laut yaitu harus memiliki Angkatan laut yang handal. Tetapi, kekuatan nomor satu tidak selalu mengarah pada yang terakhir. Dengan tidak melihat kekuatan angkatan laut, jika suatu negara benar – benar menguasai laut, perlu mengembangkan strategi angkatan laut secara tepat. Melihat pendapat dari Mahan bahwa strategi angkatan laut pada masa damai ataupun saat terjadinya perang memiliki tujuan akhir yaitu untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan angkatan laut negaranya. Sea power yang dimiliki oleh suatu negara, dan terlebih penting pada Komando Angkatan Laut, sangat berpegang dan menomor satukan serta mengedepankan pada strategi pertahanan dari TNI Angkatan Laut dan kehandalan dari armadanya. Tanpa kekuatan TNI AL yang memadai dan armada handal, dan alutsista yang modern, serta yang efektif, maka akan sangat sulit jika ingin menguasai suatu daerah. Musuh yang berasal dari negara lainnya dapat bertindak sebagai blokade perairan atau dapat mengirimkan sebuah serangan (University of Birmingham, 2015).



Mahan (1890) mengatakan bahwa command of the sea hanya dapat dilakukan oleh suatu negara jika negara tersebut melaksanakan penggabungan Angkatan Laut yang kuat dan mampu untuk menerapkan strategi yang tepat. Strategi angkatan laut membutuhkan perbedaan diantara strategi yang ofensif dan defensif. Strategi pertahanan dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua yaitu strategi pertahanan maritim serta strategi pertahanan pada sepanjang garis pantai atau pertahanan wilayah pesisir. Pada sebelumnya, konsep dari strategi pertahanan hanya mengacu pada pertahanan darat. Aktivitas dan operasi militer tradisional hanya sebatas pada bagaimana membuat pasukan musuh mundur dan pada kondisi ini TNI AD bertugas untuk membangun pertahanan. Disisi lain TNI AL memiliki tugas untuk membangun pertahanan pada wilayah lepas pantai.

Komando Angkatan Laut tidak hanya sebatas pada kekuatan TNI AL saja. Ini juga membutuhkan kerangka geopolitik yang menguntungkan agar TNI AL dapat memainkan perannya yang bersifat strategis. Hal tersebut dapat ditentukan oleh geografi sebagai persyaratan utama mengenai kekuatan laut. Pendapat Mahan lainnya yaitu saat suatu negara telah membentuk kekuatan angkatan laut yang kuat, negara tersebut harus segera merebut atau menduduki tempat yang kondisi geografisnya dapat memberikan keuntungan dalam menjalankan strategi pertahanan lautnya dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan untuk melakukan komando laut.

Terdapat faktor penting yang dapat menjadi penentu dari strategi angkatan laut suatu negara memungkinkan dalam mendukung tujuan perebutan kekuatan angkatan laut. Sebagai contoh, lokasi geografis untuk penyebaran angkatan laut yang efektif. Sebuah pulau atau pelabuhan di dekat daratan, angkatan laut antara pangkalan militer asing dan front strategis, dan rute laut yang penting tergantung pada kekuatan ekonomi atau militer laut negara tersebut.



Ancaman Non-Militer

Dari berbagai bentuk ancaman non-militer, terdapat salah satu ancaman yang disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi telah menciptakan peluang untuk secara sadar atau tidak sadar mengaburkan batas-batas hubungan antar bangsa dan memasuki budaya asing yang berdampak negatif secara langsung.

Dari banyaknya ancaman dalam hal ini bidang non-militer pada dasarnya adalah ancaman yang ditimbulkan dari faktor non-militer yang bisa berpotensi mengacaukan kekuasaan negara, kesatuan wilayah, dan keamanan bangsa. Perubahan ancaman dalam bidang militer menuju ancaman non-militer serta hibrida menjadi akibat dari berubahnya kerangka berpikir keamanan menurut state security sebagai human security. Dari ancaman dibidang non-militer ini terdiri menurut formatnya menggunakan spektrum yang sangat luas dan kompleks. Daripada itu, ancaman dapat bersumber dari luar dan dalam negeri, dilihat dari aktor dapat dikategorikan dalam negara dan non negara (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Dapat dilihat bahwa Ancaman pada suatu Negara dalam kategori ideologi yaitu komunisme yang masuk sebagai paham dengan seluruh pengaruhnya dan liberalisme atau pemahaman yang mengutamakan kebebasan yang berpotensi merusak ideologi Negara Pancasila. Penyebab masuknya berbagai paham tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pengaruh dari simbol komunisme, menjalarnya pemikiran berdasarkan Atheisme (pemahaman yang meyakini ketidakadannya Tuhan), Sekulerisme (pemahaman yang meyakini urusan antara agama yang terpisah dari Negara), Hedonisme (pemahaman yang meyakini dan membuat seseorang untuk mengutamakan kepentingan duniawi dengan tidak memedulikan nilai serta norma), Kapitalisme, Seks Bebas, dan paham lainnya yang menjadi akar serangan ideologi asing yang berdampak negatif.

Ancaman dalam bidang politik bisa datang tak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Contoh yang dapat di ambil dari dalam negeri yaitu tindakan perebutan dan penggunaan bentuk pengerahan massa untuk



menjatuhkan pemerintah yang mengendalikan, atau mobilisasi kepentingan politik untuk menyebabkan penurunan kekuasaan pemerintah. Apalagi, ancaman pemisahan dalam berbagai bentuk seperti perang antar saudara atau separatisme yang merupakan bentuk lain dari ancaman dalam bidang politik.

Beberapa fenomena modern lebih seperti dinamika ekonomi biasa yang dapat menjadi ancaman nyata dalam arti tradisional, untuk menguasai wilayah dan mengubah institusi negara. Sulit untuk menjawab apakah krisis ekonomi merupakan suatu bentuk untuk menghancurkan negara Indonesia atautkah akibat dari ancaman ekonomi yang tak terhindarkan dari dinamisme ekonomi dewasa ini dan rapuhnya struktur perekonomian Indonesia. Ancaman ekonomi dapat memiliki implikasi militer, seperti kerugian fisik yang menyebabkan pemotongan anggaran atau mengganggu pasokan logistik yang dibutuhkan untuk pengembangan dan operasi militer.

Hankamrata atau kepanjangan dari Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta di dalamnya terdapat peran – peran non-militer yang merupakan elemen dari Sishankamrata, pedoman bagi semua elemen kekuatan nasional selain sektor pertahanan untuk memerangi ancaman non-militer. Penjelasan tentang pertahanan dan keamanan nirmiliter. Terutama terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan dan pemerintah daerah, serta didukung oleh K/L dan pemerintah daerah lainnya tergantung pada sifat dan bentuk non-militernya. Area militer untuk melawan ancaman.

Hankamrata dalam bidang nirmiliter memiliki esensi dari berbagai upaya universal untuk menghadapi ancaman yang bersifat non-militer. Di masa yang akan datang, Sishankamrata sangat memerlukan keteraturan secara terstruktur antara Hankamrata bidang Militer dan Hankamrata bidang non-militer dengan cara membentuk kemampuan serta kekuatan dari Sishankamrata yang tangguh. Aspek pertahanan dan keamanan rakyat semesta non-militer ini dimanifestasikan ke dalam



aspek strategi pertahanan non-militer dan aspek kapabilitas pertahanan dan keamanan yang bersifat non-militer (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman Terhadap Ancaman Non-Militer

Dikutip dari Undang – Undang Pertahanan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara Pasal 7 (3) menyatakan sebagai berikut. Melihat dari bentuk dan sifat ancaman yang mendatang, serta ditopang oleh berbagai bentuk kekuatan nasional lainnya. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang tidak melibatkan penggunaan senjata. Namun, jika ancaman non-militer ini terus berlanjut, maka dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional, dan keamanan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Aspek ancaman secara non-militer meliputi ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, budaya, teknologi informasi, dan keamanan publik. Ancaman non-militer di kota Samarinda, antara lain illegal logging, konflik antar etnis, dan kelompok radikal.

Strategi pertahanan perairan pedalaman terkait erat dengan ancaman non-militer. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Perairan Pedalaman Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perairan yang tertetak pada bagian darat dari garis air rendah pantai – pantai Indonesia, didalamnya termasuk keseluruhan bagian dari perairan yang berposisi pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penetapan batas perairan pedalaman pada perairan kepulauan, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Perairan pedalaman terdiri atas laut pedalaman dan perairan darat.

Pengendalian sungai dalam suatu peperangan seringkali menjadi variabel penting untuk mengendalikan sebuah negara. Operasi sungai ini bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap lalu lintas sungai serta mendukung tujuan utama yang



ada di tepian sungai, serta mencakup berbagai aspek lainnya bukan hanya sungai itu sendiri.

Dalam misi ini mencakup beberapa aspek yaitu: (a) Pertempuran laut; (b) fire support; (c) serangan pendaratan; (d) pembersihan ranjau dan gangguan lain; (e) pengintaian; (f) jalur komunikasi keamanan; (g) dukungan logistik; (h) angkatan kekuatan darat; (i) pemutusan jalur komunikasi; (j) penggerebekan; (k) penjagaan; (l) kehadiran (presence); (m) penindakan pembajakan; (n) penyelundupan dan pemberantasan penyelundupan; (o) penindakan perdagangan manusia (prostitusi, perbudakan, imigrasi ilegal); (p) dukungan keamanan oleh kepolisian, dukungan di bidang perikanan; (q) host nation training; (r) pemulihan dan parkir kapal; (s) dukungan medis / evakuasi; (t) bantuan kemanusiaan; serta (u) penghubung dengan unit angkatan laut / darat dan warga sipil setempat.

Dalam penelitian ini, perairan pedalaman yang menjadi perhatian adalah sungai – sungai yaitu Sungai Mahakam di Samarinda. Seperti diketahui, Sungai Mahakam merupakan salah satu sarana transportasi air yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat Kalimantan Timur. Kapal – kapal besar bisa melewati Sungai Mahakam itu sendiri. Panjang dan keberadaan anak sungai Mahakam yang cukup lebar dapat menimbulkan ancaman non-militer. Seperti diketahui, di Kaltim sendiri banyak terjadi kasus illegal logging yang kayunya dibawa oleh sungai. Saat ini, Sungai Mahakam berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan di bagian hulu, terutama akibat penebangan liar dan penambangan.

Selain itu, keselamatan perairan pedalaman Sungai Mahakam khususnya sangat penting karena di hilir sungai dan anak-anak sungainya dapat menjadi tempat masuknya kapal-kapal asing dan kecil yang mengancam bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda, mereka menggunakan Sungai Kalimas untuk mencapai pelabuhan utama Surabaya, menggunakan bantaran sungai sebagai gudang untuk menyambung ke pedalaman.



Kasus ini menunjukkan bahwa sungai / perairan pedalaman dapat menyebabkan serbuan pihak asing yang mengancam negara. Belajar dari apa yang dilakukan Belanda, sistem pertahanan perairan pedalaman harus menjadi perhatian kita.

Oleh karena itu, mempertahankan perairan pedalaman memerlukan strategi dengan metode, cara, dan tujuan untuk menghadapi ancaman non-militer. Terkait dengan prediksi ancaman nirmiliter terhadap Sungai Mahakam, pemangku kepentingan akan lebih mengoptimalkan kemampuan personel dan pembangunan infrastruktur, antara lain pos-pos angkatan laut di hilir sungai, jalan sekunder, dan lokasi ancaman nirmiliter yang strategis. Selain itu, perlu pengadaan kapal patroli dan personel untuk mengamankan jalur Sungai Mahakam. Selain itu, sinergi antara lembaga pertahanan dan non-pertahanan diperlukan untuk mendukung terciptanya perairan pedalaman Indonesia yang aman dan terkendali.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Dalam mendukung pertahanan negara di Ibu Kota Nusantara dibutuhkan strategi pertahanan perairan pedalaman terutama agar dapat menghadapi ancaman non-militer di Sungai Mahakam. Strategi yang patut diterapkan dan dianggap efektif yaitu dengan pemusatan TNI Tri Matra di wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar mampu mengelola dan merealisasikan dokumen kebijakan serta membangun Sistem Pertahanan Negara untuk mendukung program pemerintah yaitu rencana pembangunan IKN.

Dengan pemusatan TNI di IKN dapat mewujudkan penata kelolaan sistem pertahanan militer tri matra terpadu yang terintegrasi dengan komponen pertahanan nirmiliter di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Terutama dalam menghadapi ancaman non militer yang cepat berubah maupun kemampuan teknis dalam penataan ruang wilayah pertahanan dan koordinasi aktif bersama kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah setempat, karena TNI hanya bersifat membantu dalam menghadapi ancaman non-militer.



Strategi selanjutnya melihat pada letak geografis wilayah IKN yang dekat dengan ALKI II, maka pemerintah perlu mendukung pemenuhan sarana dan prasarana Pangkalan sesuai Standarisasi Kelas Pangkalan dengan teknologi yang canggih. Dengan rencana pembangunan Kodamar / Lantamal IKN – Faslabuh Ideal TNI AL di Samboja dan Pengembangan dari Kekuatan Eksisting Lanal Balikpapan (Tipe B) menjadi Kodamar Balikpapan, serta Pangkalan pendukung Escape VVIP aspek laut.

Hal yang perlu disadari bahwa teknologi memegang peranan penting dalam implementasi strategi keamanan laut untuk menghadapi ancaman maritim di tengah revolusi industri 4.0, maka pangkalan butuh didukung dengan teknologi canggih. Indonesia perlu mengembangkan sistem nir-awak yaitu seaglider demi menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

Dengan mendorong kedua strategi tersebut diharapkan secara efektif dapat meningkatkan pertahanan negara dalam perannya menghadapi ancaman non militer khususnya di IKN baru. Dengan penguatan peran TNI sebagai komponen cadangan dapat mengoptimalkan strategi guna menjaga kedaulatan dan martabat bangsa, khususnya dimata negara-negara tetangga. Tak hanya Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, tetapi kita dapat memberikan fokus pada komponen cadangan yang dalam hal ini termasuk komponen pendukung perlu berupaya mendorong pemerintah agar dapat mewujudkan kebijakan – kebijakan strategis demi pertahanan negara.

Daftar Pustaka

Bappenas. (2022). Rencana Induk IKN dalam Lampiran Undang – Undang IKN. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).



- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Mahan, A. T. (1890). The Influence of Sea Power Upon History. Boston: Little, Brown, and Company.
- Parliament of Australia. (2018). Maritime Strategy Concept. Canberra: Parliament of Australia.
- Sea Power Centre Australia. (2013). What is a Maritime Strategy? Canberra: Sea Power Centre Australia.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- Undang – Undang Pertahanan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara
- University of Birmingham. (2015). Learn from the Sea Power Theory and Geopolitical Theory. Birmingham: University of Birmingham.